PROFIL PERUSAHAAN
PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

1	Nama Perusahaan	:	PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.
2	Alamat lengkap	:	Wisma Eka Jiwa Lt. 8-9, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat
3	No. Telepon dan Fax.	:	021-5059 7777 dan Fax. 021-5060 8899
4	E-mail	:	cs@sinarmasmsiglife.co.id
5	NPWP	:	01.391.150.8-073.000
6	No. & Tanggal Izin Usaha	:	KEP-649/KM.10/2011 Tanggal 3 Agustus 2011
7	a. Jumlah Cabang/ Perwakilan	:	31
	b. Jumlah Tertanggung	:	934,452
8	Auditor Eksternal	:	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)
9	Pemegang Saham		

Nama Pemegang Saham	Pemegang Saham Pengendali	Kepemilikan Saham	
		Rupiah	Persentase
Mitsui Sumitomo Insurance Co, Ltd	Mitsui Sumitomo Insurance Co, Ltd	Rp 168.000.000.000,-	80%
PT Sinarmas Multiartha, Tbk.		Rp 26.250.000.000,-	12.5%
Publik		Rp 15.750.000.000,-	7.5%
Total		Rp 210,000,000,000,-	100%

10	Pengendali	:	Mitsui Sumitomo Insurance Co, Ltd
11	Direksi dan Komisaris		

Nama Direksi	Jabatan	Nama Komisaris	Jabatan
Wianto	Presiden Direktur	Indra Widjaja	Presiden Komisaris
Shinichiro Suzuki	Wakil Presiden Direktur	Toshinari Tokoi	Komisaris
Herman Sulistyo	Direktur	Hideaki Nomura	Komisaris
Satoshi Shiratani	Direktur	Ardhayadi Mitroatmodjo	Komisaris Independen
Tomoyuki Monden	Direktur	Sidharta Akmam	Komisaris Independen
Gideon	Direktur	Nazly Parlindungan Siregar	Komisaris Independen
Andrew Bain	Direktur		

12 PIC Laporan

Nama	Jabatan	Email	Nomor Telepon/HP

Johana M Louhenapessy	Compliance & Investigation Division Head	Johana.Louhenapessy@sinarmasmsiglife.co.id	021-5059 7777/08812343398

13 Tenaga Dengan Kualifikasi Ahli

Nama	Kualifikasi dan No. Registrasi	Lembaga Pemberi Kualifikasi	Bidang Keahlian
Yulia Andri Hartiana Dwi P	AAIJ - 98010034	AAMAI	Ahli Asuransi Jiwa
Dian Permata Sari	AAIJ – 96030246	AAMAI	Ahli Asuransi Jiwa Syariah
Ferventika Sundah	FSAI – 201110924	PAI	Aktuaris Perusahaan

14 Jumlah Tenaga Kerja (termasuk Direksi/Pengurus) : 541

15 Jumlah Agen
- a. Badan Hukum : -
- b. Perorangan : 2.578

16 Jumlah Pialang : 17

Jakarta, 27 Mei 2022
PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.

PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk. KANTOR PUSAT

Wianto Chen
Presiden Direktur

Herman Sulistyo
Direktur

I. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

a. Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Peserta	Keputusan RUPS	Nomor Akta Notaris	Ket
1.	25 Mei 2021	1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2021.	1.942.504.900 pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,50% dari total 2.100.000.000 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan	**Mata Acara Rapat Pertama** 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, anggota dari Ernst & Young Global sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 00445/2.1032/AU.1/08/0695-2/1/IV/2021 tertanggal 9 April 2021, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka RUPS	- Akta No. 58 tanggal 25 Mei 2021 (Berita Acara RUPS Tahunan) Akta No. 59 tanggal 25 Mei 2021 (Pernyataan Keputusan Rapat tentang Pengangkatan Bapak Andrew Bain sebagai Direktur dan Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris)	Seluruh keputusan Rapat sudah dilaksanakan oleh Perusahaan

		4. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2021. 5. Persetujuan pengangkatan anggota Direksi dan pengangkatan kembali anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan.		memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab *(acquit et de charge)* kepada seluruh anggota Direksi Perusahaan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan tahun buku 2020. **Mata Acara Rapat Kedua** 1. Menetapkan bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global), laba bersih Perusahaan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp354.763.000.000 (tiga ratus lima puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta Rupiah) ("Laba Bersih 2020"). 2. Menyetujui penggunaaan Laba Bersih 2020 sebagai berikut: a. Sebesar Rp3.547.000.000 (tiga miliar lima ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) atau sebesar 1% dari Laba Bersih 2020 disisihkan untuk dana cadangan.		

				b. Sebesar Rp351.216.000.000 (tiga ratus lima puluh satu milyar dua ratus enam belas juta Rupiah) atau 99% dari Laba Bersih 2020 yang dapat diatribusikan kepada Pemegang Saham Perusahaan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perusahaan dan mengambil sebesar Rp159.084.000.000 (seratus lima puluh sembilan miliar delapan puluh empat juta Rupiah) dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perusahaan. Sehingga jumlah dividen tunai adalah sebesar Rp510.300.000.000 (lima ratus sepuluh miliar tiga ratus juta Rupiah). Dengan demikian, besarnya dividen tunai yang diterima oleh pemegang 1 (satu) saham adalah Rp243 (dua ratus empat puluh tiga Rupiah). c. Atas pembayaran dividen tunai tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut: i. dividen tunai untuk tahun buku 2020 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal pencatatan		

				(recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi; ii. atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2020, Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; 3. Direksi diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2020, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai dengan memerhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bursa Efek Indonesia, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, dan selanjutnya menyampaikan laporan dan/atau meminta persetujuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Mata Acara Rapat Ketiga** 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi		

				untuk menetapkan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan gaji atau honorarium, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan. **Mata Acara Rapat Keempat** 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan kriteria: Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan merupakan pihak yang independen dan profesional untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan memerhatikan rekomendasi dari Komite Audit.		

				2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **Mata Acara Rapat Kelima** 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Andrew Bain sebagai Direktur Perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh OJK sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-2 (kedua) berikutnya. 2. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan, yaitu: - Bapak Shinichiro Suzuki sebagai Wakil Presiden Direktur Perusahaan; - Bapak Gideon sebagai Direktur Perusahaan; - Bapak Herman Sulistyo sebagai Direktur Perusahaan, - Bapak Indra Widjaja sebagai Presiden Komisaris Perusahaan; - Bapak Toshinari Tokoi sebagai Komisaris Perusahaan; - Bapak Hideaki Nomura sebagai Komisaris Perusahaan; - Bapak Ardhayadi Mitroatmodjo sebagai Komisaris Independen Perusahaan;		

				- Bapak Sidharta Akmam sebagai Komisaris Independen Perusahaan; - Bapak Endy Mohammad Astiwara selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Perusahaan; dan - Bapak Ahmadi Sukarno selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan. Masing-masing berlaku efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-2 (kedua) berikutnya. 3. Untuk selanjutnya susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan menjadi sebagai berikut: **Direksi** Presiden Direktur : Bapak Wianto Wakil Presiden Direktur : Bapak Shinichiro Suzuki Direktur : Bapak Gideon Direktur : Bapak Herman Sulistyo Direktur : Bapak Satoshi Shiratani Direktur : Bapak Tomoyuki Monden Direktur : Bapak Andrew Bain **Dewan Komisaris** Presiden Komisaris: Bapak Indra Widjaja Komisaris: Bapak Toshinari Tokoi Komisaris: Bapak Hideaki Nomura Komisaris Independen: Bapak Ardhayadi Mitroatmodjo		

				Komisaris Independen: Bapak Sidharta Akmam Komisaris Independen: Ibu Nazly Parlindungan Siregar **Dewan Pengawas Syariah** Ketua : Bapak Endy Muhammad Astiwara Anggota : Bapak Ahmadi Sukarno - Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan pengurus Perusahaan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

b. Direksi

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan Oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarga-negaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir Dan Gelar Profesi	Uji Kemampuan Dan Kepatutan				
1	Wianto	Presiden Direktur	Sarjana Akuntansi – Universitas Nommensen	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-23/KDK.05/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Wianto Selaku Calon Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk., tertanggal 8 Juli 2020	29 Juli 2020 (Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 51 Tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta).	Hingga RUPS Tahunan Kedua sejak tanggal pengangkatan	Indonesia	Indonesia
2	Shinichiro Suzuki	Wakil Presiden Direktur	Sarjana Teknik - Universitas Tokyo	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-32/KDK.05/2019 tentang Hasil Penilaian	10 Mei 2019 (Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti RUPSLB tanggal	Hingga RUPS Tahunan Kedua sejak tanggal pengangkatan kembali	Jepang	Indonesia

				Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Shinichiro Suzuki Selaku Calon Wakil Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG tertanggal 10 April 2019	10 Mei 2019, yang diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 46 tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta) Diangkat kembali dalam RUPS Tahunan 25 Mei 2021 (Akta No. 59 tanggal 25 Mei 2021)			
3	Herman Sulistyo	Direktur	Sarjana Matematika - Universitas Indonesia	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-28/KDK.05/2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Herman Sulistyo Selaku Calon Direktur PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG tertanggal 23 April 2018	10 Mei 2019 (Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti RUPSLB tanggal 10 Mei 2019, yang diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 46 tanggal 23 Mei 2019 yang	Hingga RUPS Tahunan Kedua sejak tanggal pengangkatan kembali	Indonesia	Indonesia

					dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta) Diangkat kembali dalam RUPS Tahunan 25 Mei 2021 (Akta No. 59 tanggal 25 Mei 2021)			
4.	Gideon	Direktur	Magister Manajemen - Universitas Pelita Harapan	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-29/KDK.05/2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Gideon Selaku Calon Direktur PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG tertanggal 23 April 2018	10 Mei 2019 (Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti RUPSLB tanggal 10 Mei 2019, yang diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 46 tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta). Diangkat kembali dalam RUPS Tahunan	Hingga RUPS Tahunan Kedua sejak tanggal pengangkatan kembali	Indonesia	Indonesia

					25 Mei 2021 (Akta No. 59 tanggal 25 Mei 2021)			
5.	Satoshi Shiratani	Direktur	Sarjana Ekonomi - Hitotsubashi University	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-24/KDK.05/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Satoshi Shiratani Selaku Calon Direktur PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk., tertanggal 8 Juli 2020.	24 September 2020 (Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 Tanggal 24 September 2020 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta)	Hingga RUPS Tahunan Kedua sejak tanggal pengangkatan	Jepang	Indonesia
6.	Tomoyuki Monden	Direktur	Master of Business Administration - University of Illinois	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP 25/KDK.05/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Tomoyuki Monden Selaku Calon Direktur PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. tertanggal 8 Juli 2020	24 September 2020 (Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 Tanggal 24 September 2020 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta)	Hingga RUPS Tahunan Kedua sejak tanggal pengangkatan	Jepang	Indonesia
7.	Andrew Bain	Direktur	Master Manajemen	Keputusan Anggota Dewan	25 Mei 2021	Hingga RUPS Tahunan	Indonesia	Indonesia

			Retail – Universitas Pelita Harapan	Komisioner OJK Nomor KEP 316/KEP-316/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Andrew Bain Selaku Calon Direktur PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. tertanggal 20 Mei 2021	(Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 Tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta)	Kedua sejak tanggal pengangkatan		

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.	Wianto	Presiden Direktur	29 Juli 2020 (Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 51 Tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta).	-
2.	Shinichiro Suzuki	Wakil Presiden Direktur	10 Mei 2019 (Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti RUPSLB tanggal 10 Mei 2019, yang diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 46 tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta) Diangkat kembali dalam RUPS Tahunan 25 Mei 2021 (Akta No. 59 tanggal 25 Mei 2021)	-
3.	Herman Sulistyo	Direktur	10 Mei 2019 (Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti RUPSLB tanggal 10 Mei 2019, yang diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor	-

			46 tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta) Diangkat kembali dalam RUPS Tahunan 25 Mei 2021 (Akta No. 59 tanggal 25 Mei 2021)	
4.	Gideon	Direktur	10 Mei 2019 (Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti RUPSLB tanggal 10 Mei 2019, yang diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 46 tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta). Diangkat kembali dalam RUPS Tahunan 25 Mei 2021 (Akta No. 59 tanggal 25 Mei 2021)	-
5.	Satoshi Shiratani	Direktur	24 September 2020 (Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 Tanggal 24 September 2020 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta)	-
6.	Tomoyuki Monden	Direktur	24 September 2020 (Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 Tanggal 24 September 2020 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta)	-

3) Rangkap jabatan Direksi

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
Tidak ada					

4) Frekuensi rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi	% Kehadiran

			Jumlah Rapat Fisik (Selama Menjabat)	Jumlah Kehadiran		
				Rapat Fisik yang dihadiri	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Wianto	Presiden Direktur	0	0	12	100%
2.	Shinichiro Suzuki	Wakil Presiden Direktur	0	0	12	100%
3.	Herman Sulistyo	Direktur	0	0	12	100%
4.	Gideon	Direktur	0	0	12	100%
5.	Satoshi Shiratani	Direktur	0	0	12	100%
6.	Tomoyuki Monden	Direktur	0	0	12	100%
7.	Andrew Bain*	Direktur	0	0	7	100%

Rapat Direksi yang telah diadakan setiap bulan (12 kali) selama 2021, antara lain membahas dan memutuskan:
1. Memutuskan jadwal pelaksanaan RUPS Tahunan untuk diajukan kepada BOC
2. Membahas laporan progress pengembangan proses/operasional secara berkala
3. Memutuskan proposal terkait strategi penjualan dilakukan oleh tenaga penjual dengan tujuan optimalisasi sumber daya internal.
4. Membahas mengenai kebutuhan akan peningkatkan keamanan IT
5. Persetujuan proposal atas thema laporan tahunan
6. Pembahasan mengenai kebijakan SDM dan kebijakan kantor terkait pengaruh Covid-19
7. Menyetujui perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Reasuransi.
8. Pembahasan dan analisa laporan hasil evaluasi kinerja kantor cabang
9. Pembahasan dan persetujuan mengenai AML & CFT dan DUA, dan Pedoman/SOP terkait.
10. Pembahasaan proses pembentukan konglomerasi keuangan
11. Perencanaan tanggal dan konsep Public Expose 2021
12. Pembahasaan progress inisiatif untuk mempercepat adaptasi Bisnis dengan *new normal* 'pengaruh Covid-19'
13. Menyetujui laporan realisasi Rencana Bisnis 2021 semester 1
14. Pembahasan dan penentuan batas penempatan pada Deposito
15. Pembahasan proses persiapan Rencana Bisnis 2021
16. Menyetujui pengajuan Rencana Bisnis 2021 untuk selanjutnya diajukan ke Dewan Komisaris
17. Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Catatan:

*) Efektif menjabat sebagai Direktur pada tanggal 25 Mei 2021 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 Tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

5) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								
			A		B		C		D		Ket: Indonesia/Luar Negeri
			Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	
1.	Wianto	Presiden Direktur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Shinichiro Suzuki	Wakil Presiden Direktur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Herman Sulistyo	Direktur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	Gideon	Direktur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.	Satoshi Shiratani	Direktur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.	Tomoyuki Monden	Direktur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.	Andrew Bain	Direktur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

A. Perusahaan yang bersangkutan;

B. perusahaan perasuransian lain;

C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan

D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

6) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

No.	Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
		Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	Wianto		✓			✓			✓			✓	
2.	Shinichiro Suzuki		✓			✓			✓			✓	
3.	Herman Sulistyo		✓			✓			✓			✓	
4.	Gideon		✓			✓			✓			✓	
5.	Satoshi Shiratani		✓			✓			✓			✓	
6.	Tomoyuki Monden		✓			✓			✓			✓	
7.	Andrew Bain		✓			✓			✓			✓	

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
		Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	Wianto		✓			✓			✓			✓	
2.	Shinichiro Suzuki		✓			✓			✓			✓	
3.	Herman Sulistyo		✓			✓			✓			✓	
4.	Gideon		✓			✓			✓			✓	
5.	Satoshi Shiratani		✓			✓			✓			✓	
6.	Tomoyuki Monden		✓			✓			✓			✓	
7.	Andrew Bain		✓			✓			✓			✓	

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb

**) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ ipar,dsb

c. Dewan Komisaris

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarga-negaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.	Indra Widjaja	Presiden Komisaris	Bachelor of Commerce - Nanyang University	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-191/BL/2007 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Atas Nama Indra Wijaya tertanggal 18 Juni 2007	23 Mei 2019 (Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 46 Tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta) dan diangkat kembali sebagai Presiden Komisaris berdasarkan (Akta Pernyataan	Hingga RUPS Tahunan Kedua sejak tanggal ditandatanganinya keputusan sirkuler	Indonesia	Indonesia

					Keputusan Rapat Nomor 59 Tanggal 25 Mei 2021) yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta.			
2.	Toshinari Tokoi	Komisaris	Sarjana Hukum dan Politik - Universitas Keio, Jepang	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-34/D.05/2013 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Atas Nama Toshinari Tokoi tertanggal 29 Mei 2013	23 Mei 2019 (Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 46 Tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta dan diangkat kembali sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 Tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta).	Hingga RUPS Tahunan Kedua sejak tanggal ditandatanganinya keputusan sirkuler	Jepang	Indonesia

3.	Hideaki Nomura	Komisaris	Master of Business Administration - Hitotsubashi University	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-91/KDK.05/2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Hideaki Nomura Selaku Calon Komisaris PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk tertanggal 3 Oktober 2019	22 Agustus 2019 (Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Agustus 2019 yang keputusannya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 36 Tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta. Pengangkatan beliau sebagai Komisaris Perusahaan ditegaskan kembali dalam Akta No. 25 tanggal 21 November 2019, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.	Hingga RUPS Tahunan Kedua berikutnya	Jepang	Jepang

					Beliau diangkat kembali sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 Tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta).			
4.	Ardhayadi Mitroatmodjo	Komisaris Independen	Master of Arts Development Banking - American University, Washington DC	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-81/KDK.05/2013 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Atas Nama Ardhayadi Mitroatmodjo tertanggal 15 Agustus 2013	23 Mei 2019 (Keputusan Pemegang Saham Nomor 46 Tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta dan diangkat kembali sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 Tanggal 25	Hingga RUPS Tahunan Kedua sejak tanggal ditandatanganinya keputusan sirkuler	Indonesia	Indonesia

					Mei 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta).			
5.	Sidharta Akmam	Komisaris Independen	Magister Sains Hubungan Internasional - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Indonesia	Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/KDK.05/2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Atas Nama Sidharta Akmam tertanggal 12 Februari 2015	23 Mei 2019 (Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 46 Tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta dan diangkat kembali sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 Tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta).	Hingga RUPS Tahunan Kedua sejak tanggal ditandatanganinya keputusan sirkuler	Indonesia	Indonesia
6	Nazly Parlindungan Siregar	Komisaris Independen	Master of Science in Taxation -	Keputusan Dewan Komisioner OJK	16 Juni 2020 (Akta Pernyataan	Hingga RUPS Tahunan Kedua sejak tanggal	Indonesia	Indonesia

			Golden Gate University, California, USA Bachelor of Science in Commerce, jurusan Akuntansi - Santa Clara University, California, USA.	Nomor KEP-58/KDK.05/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri.Nazly Parlindungan Siregar tertanggal 23 September 2020	Keputusan Rapat Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta).	ditandatanganinya keputusan sirkuler		

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
Tidak Ada				

3) Rangkap jabatan Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Indra Widjaja	Presiden Komisaris	1. Komisaris Utama	PT Sinar Mas Multiartha Tbk	Holding Company
			2. Komisaris Utama	PT Asuransi Sinar Mas	Asuransi Umum
			3. Komisaris Utama	PT Sinarmas Multifinance	Perusahaan Pembiayaan
			4. Komisaris Utama	PT AB Sinar Mas Multifinance	Perusahaan Pembiayaan
			5. Komisaris	PT Shinta Utama	Perdagangan Besar

			6. Komisaris Utama	PT Sinartama Gunita	BAE
			7. Komisaris Utama	PT Pasar Dana Pinjaman	Peer to Peer Lending
			8. Komisaris Utama	PT KB Insurance Indonesia	Asuransi Umum
2.	Hideaki Nomura	Komisaris	1. Senior General Manager, International Life Insurance Business Dept.	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	Perusahaan Jasa Keuangan
			2. Senior General Manager, Asian Life Insurance Business Dept.	Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.	Perusahaan Jasa Keuangan
			3. Direktur	Max Financial Services Limited	Perusahaan Jasa Keuangan
			4. Direktur	BOCOM MSIG Life Insurance Company Limited	Perusahaan Jasa Keuangan
3.	Nazly Parlindungan Siregar	Komisaris Independen	1. Komisaris Independen	PT. Principal Asset Management Indonesia	Asset Management
			2. Senior Tax Advisor	Assegaf Hamzah & Partners	Konsultan Hukum
4	Ardhayadi Mitroatmodjo	Komisaris Independen	Komisaris Independen	PT Smart Tbk	Perkebunan

4) Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris			% Kehadiran
			Jumlah Rapat Fisik (Selama Menjabat)	Jumlah Kehadiran		
				Rapat Fisik yang dihadiri	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Indra Widjaja	Presiden Komisaris	0	0	12	100%
2.	Toshinari Tokoi	Komisaris	0	0	12	100%
3.	Hideaki Nomura	Komisaris	0	0	12	100%
4.	Ardhayadi Mitroatmodjo	Komisaris Independen	0	0	12	100%
5.	Sidharta Akmam	Komisaris Independen	0	0	12	100%
6.	Nazly Parlindungan Siregar	Komisaris Independen	0	0	12	100%

1. Merekomendasikan untuk memerhatikan kesesuaian strategi pada kondisi Covid-19
2. Merekomendasikan untuk memerhatikan dampak Covid-19 dan mengupayakan efisiensi biaya untuk mengatasi dampak negatif terhadap keuangan Perusahaan.
3. Merekomendasikan untuk memerhatikan peluang melalui perkembangan sosial dan teknologi dalam mendukung proses layanan yang lebih baik dan cepat bagi kenyamanan nasabah dan calon nasabah.
4. Merekomendasikan untuk melakukan review regular atas risiko likuiditas.
5. Merekomendasikan untuk memerhatikan ketentuan peraturan yang berlaku dalam penyusunan struktur organisasi Perusahaan.
6. Merekomendasikan supaya strategi pengembangan bisnis dilakukan dengan lebih hati-hati, termasuk dalam hal mempersiapkan manajemen risiko bisnis.
7. Merekomendasikan untuk mengutamakan keselamatan karyawan dalam menjalankan aktivitas operasional Perusahaan dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang disarankan Pemerintah dan memerhatikan persiapan infrastruktur yang memadai utnuk mendukung proses operasional.

5) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi			% Kehadiran
			Jumlah Rapat Fisik (Selama Menjabat)	Jumlah Kehadiran		
				Rapat Fisik yang dihadiri	Telekonferensi/Video/ Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	Indra Widjaja	Presiden Komisaris	0	0	12	100%
2.	Toshinari Tokoi	Komisaris	0	0	12	100%
3.	Hideaki Nomura	Komisaris	0	0	12	100%
4.	Ardhayadi Mitroatmodjo	Komisaris Independen	0	0	12	100%
5.	Sidharta Akmam	Komisaris Independen	0	0	12	100%
6.	Nazly Parlindungan Siregar	Komisaris Independen	0	0	12	100%
7.	Wianto	Presiden Direktur	0	0	11	91,67%
8.	Shinichiro Suzuki	Wakil Presiden Direktur	0	0	12	100%
9.	Herman Sulistyo	Direktur	0	0	12	100%
10.	Gideon	Direktur	0	0	12	100%
11.	Satoshi Shiratani	Direktur	0	0	12	100%
12.	Tomoyuki Monden	Direktur	0	0	12	100%
13.	Andrew Bain*	Direktur	0	0	7	100%

Catatan:

*) Efektif menjabat sebagai Direktur pada tanggal 25 Mei 2021 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 Tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

6) Pengungkapan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								
			A		B		C		D		Ket: Indonesia/Luar Negeri
			Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	% Kepemilikan	
1.	Indra Widjaja	Presiden Komisaris	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Toshinari Tokoi	Komisaris	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Hideaki Nomura	Komisaris	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	Ardhayadi Mitroatmodjo	Komisaris Independen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.	Sidharta Akmam	Komisaris Independen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.	Nazly Parlindungan Siregar	Komisaris Independen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

A. Perusahaan yang bersangkutan;

B. perusahaan perasuransian lain;

C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan

D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

7) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	Indra Widjaja		✓			✓			✓			✓	
2.	Toshinari Tokoi		✓			✓			✓			✓	
3.	Hideaki Nomura		✓			✓			✓			✓	
4.	Ardhayadi Mitroatmodjo		✓			✓			✓			✓	
5.	Sidharta Akmam		✓			✓			✓			✓	
6.	Nazly Parlindungan Siregar		✓			✓			✓			✓	

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
		Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
		Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*	Ya	Tidak	Ket*
1.	Indra Widjaja		✓			✓			✓			✓	

2.	Toshinari Tokoi		✓			✓			✓			✓	
3.	Hideaki Nomura		✓			✓			✓			✓	
4.	Ardhayadi Mitroatmodjo		✓			✓			✓			✓	
5.	Sidharta Akmam		✓			✓			✓			✓	
6.	Nazly Parlindungan Siregar		✓			✓			✓			✓	

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb

**) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

d. Dewan Pengawas Syariah

1) Jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Kriteria		Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarga-negaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1	DR. H. Endy Mohammad Astiwara, MA	Ketua	Doktor Metodologi Hukum Islam Universitas Islam Negeri	Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-224/NB.1/2015 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Atas Nama Endy M. Astiwara tertanggal 10 Februari 2015	10 Mei 2019 (Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti RUPSLB tanggal 10 Mei 2019, yang diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 46 tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta)	Hingga RUPS Tahunan Kedua sejak tanggal ditandatanganinya keputusan sirkuler	Indonesia	Indonesia
2	DR. H. Ahmadi Sukarno, Lc, M.Ag.	Anggota	Doktor Pendidikan Islam dari Universitas Ibnu Khaldun	Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan	10 Mei 2019 (Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang	Hingga RUPS Tahunan Kedua sejak tanggal ditandatanganinya	Indonesia	Indonesia

				Nomor: KEP-226/NB.1/2015 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Atas Nama Ahmadi Sukarno tertanggal 10 Februari 2015	Saham sebagai pengganti RUPSLB tanggal 10 Mei 2019, yang diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 46 tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta)	keputusan sirkuler		

2) Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah, harus dicantumkan susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
Tidak Ada				

3) Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Ahmadi Sukarno	Anggota Dewan Pengawas Syariah	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah Bank Sinarmas	Perbankan

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
			2. Ketua Dewan Pengawas Syariah	Aset Management Sinarmas	Asset Management

4) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (6 kali rapat)		% Kehadiran
			Jumlah Kehadiran		
			Fisik	Telekonferensi/Video/Konferensi/Sarana Media Elektronik Lainnya	
1.	DR. H. Endy Mohammad Astiwara, MA	Ketua	-	6	100%
2.	DR. H. Ahmadi Sukarno, Lc, M.Ag.	Anggota	-	6	100%

e. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

1) Laporan kegiatan Dewan Komisaris (termasuk hasil pengawasan atas realisasi rencana bisnis)

Ringkasan Hasil Pengawasan	Rekomendasi
Berdasarkan pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan pengurusan kegiatan usaha Perusahaan, kami memandang kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian Perusahaan telah sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan meskipun beberapa indikator keuangan di bawah	1. Merekomendasikan untuk terus mengimplementasikan strategi yang telah dirancang Perusahaan dengan memperhatikan perkembangan pasar, teknologi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

target sebagai dampak dari pandemi yang di luar kendali Perusahaan. Sementara itu, performa Direktur secara individual dalam pencapaian kinerja Perusahaan, seperti yang tercantum dalam Kontrak Manajemen telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Lebih lanjut, kami menilai bahwa Direksi telah mengelola, memimpin, dan membawa Perusahaan pada pencapaian yang baik, sesuai dengan arah dan tujuan strategis dalam jangka menengah panjang. Kami mengapresiasi atas segala daya dan upaya maksimal yang telah dilakukan Direksi di tengah tantangan yang timbul sepanjang tahun 2021. Direksi telah bertindak secara tepat dan bijaksana dalam menyikapi segala perubahan eksternal, terutama pada kondisi ekonomi dan sosial, dengan fokus pada tujuan jangka panjang seperti yang termaktub dalam visi dan misi Perusahaan. Sesuai dengan perannya, Dewan Komisaris akan terus memberikan arahan, masukan dan motivasi sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan di masa depan. Berdasarkan data Laporan Keuangan Perusahaan yang telah teraudit, Perusahaan berhasil membukukan pendapatan premi bruto sebesar Rp 3.64 triliun atau turun sebesar 0.52%. Peningkatan pendapatan premi membuat pangsa pasar Perusahaan berdasarkan APE (*Annualized Premium Equivalent*) naik menjadi +3,0% diantara perusahaan patungan (*joint venture*) pada akhir tahun 2021. Namun, laba bersih Perusahaan tertekan oleh pertumbuhan klaim kematian yang tinggi sebagai sebagai akibat dari kasus Covid-19. Kondisi yang sama dialami oleh industri asuransi jiwa, dimana total klaim kematian meningkat 73% menjadi Rp21,1 triliun di tahun 2021. Terkait implementasi strategi yang telah dirancangkan Perusahaan, Dewan Komisaris Direksi telah memastikan bahwa pelaksanaan strategi yang dijalankan Direksi berada pada jalur yang tepat tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Keseluruhan proses telah dilakukan dengan tetap mengedepankan kepentingan dan kebutuhan pemegang saham,	2. Merekomendasikan untuk memperhatikan dampak Covid-19 yang mungkin berlanjut dan mempersiapkan strategi dalam hal berlanjutnya pandemic Covid-19. 3. Merekomendasikan untuk memperhatikan peluang melalui perkembangan sosial dan teknologi dalam mendukung proses layanan yang lebih baik dan cepat bagi kenyamanan nasabah dan calon nasabah. 4. Merekomendasikan supaya strategi pengembangan bisnis dilakukan dengan lebih hati-hati, termasuk dalam hal mempersiapkan manajemen risiko bisnis. 5. Merekomendasikan untuk meningkatkan performa Perusahaan dalam menanggapi dan menindaklanjutin pelaporan *fraud*. 6. Merekomendasikan agar implementasi tata kelola perusahaan yang baik terus ditingkatkan pada setiap aspek Perusahaan, mulai dari bisnis, investasi, dan manajemen, serta dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab Perusahaan selaku perusahaan publik kepada otoritas, regulator, dan publik.

nasabah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Beberapa pengawasan atas implementasi strategi yang menjadi pokok penting pada tahun 2021, antara lain adalah perluasan segmentasi tenaga penjual pada kanal distribusi *Bancassurance*, ekspansi bisnis pada kanal distribusi *Agency*, analisis dan evaluasi kinerja dan kerjasama dengan mitra bisnis yang menunjukkan pertumbuhan rasio klaim kematian yang tinggi, peluncuran produk-produk individu yang sesuai dengan kebutuhan pasar, penerapan strategi *new working style*, dan monitoring penerapan digitalisasi yang mendukung operasional Perusahaan. Dewan Komisaris memandang penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam tubuh Perusahaan sudah baik namun perlu terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan aktif, kami sangat memperhatikan berbagai laporan dan pertemuan rutin dengan para anggota Direksi maupun komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah turut aktif terlibat dalam proses pengawasan implementasi pelaporan *fraud* yang berjalan, meliputi prosedur pencegahan, deteksi dan identifikasi, investigasi dan pelaporan, hingga evaluasi dan tindak lanjut yang harus dilakukan. Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan terhadap aktivitas manajemen Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi, melalui pelaksanaan rapat rutin dan berkesinambungan. Komunikasi yang efektif dan komprehensif dapat dibangun dengan baik melalui 12 (dua belas) kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dilakukan setiap bulan sepanjang tahun 2021.	

2) Laporan kegiatan Komisaris Independen

Komisaris Independen sebagai bagian dari Dewan Komisaris Perseroan melaksanakan fungsi dan tanggung jawab pengawasan terhadap kinerja Direksi dan memastikan bahwa manajemen Perseroan telah dijalankan sesuai dengan visi dan misi Perusahaan, serta tetap mengedepankan kepentingan pemegang polis, tertangung, peserta, dan atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

Berdasarkan pengawasan yang kami lakukan terhadap kinerja Direksi Perusahaan selama tahun 2021, Direksi Perusahaan telah berhasil dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas bisnis Perusahaan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang sepanjang 2021 terus bergerak dinamis dan dampaknya terus berlanjut hingga saat ini.

Selain itu, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik juga telah dilaksanakan dengan cukup baik, dimana Perusahaan terus menerus berusaha untuk mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan senantiasa mengambil keputusan dan bergerak secara *due care*.

Pada sisi operasional, Perusahaan telah berhasil memperkuat dan mengoptimalkan sumber daya manusia dengan telah adanya perubahan sturktur organisasi dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan kapasitas dan keahlian individu. Selain itu, Perusahaan juga telah berhasil untuk menjaga komitmennya untuk terus menerus mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan operasional yang berbasis digital untuk mendukung bisnis, dengan terus lahirnya sejumlah aplikasi yang mempermudah pelaksanaan bisnis, pekerjaan oleh karyawan, serta terutama mempermudah nasabah untuk mengakses Perusahaan dengan aplikasi yang mutakhir.

f. Komite-Komite

1) Komite di bawah Direksi

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
1.	Komite Investasi dan Keuangan	2021	1. Satoshi Shiratani	Ketua	30 Tahun	Pedoman Kerja Komite Investasi dan Keuangan Perusahaan, yang terakhir kali diamandemen pada tanggal 23 Juni 2021.	12 kali
			2. Wianto	Anggota	25 Tahun		
			3. Shinichiro Suzuki	Anggota	24 Tahun		
			4. Herman Sulistyo	Anggota	24 Tahun		
			5. Gideon	Anggota	26 Tahun		
			6. Tomoyuki Monden	Anggota	23 Tahun		
			7. Andrew Bain*)	Anggota	23 Tahun		

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
			8. Tju Cunardi	Anggota	25 Tahun		
			9. Ferventika Sundah	Anggota	20 Tahun		
			10. Furqon Wirawan Damanik	Anggota	14 Tahun		

*) : Efektif menjabat sebagai Direktur pada tanggal 25 Mei 2021 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 Tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
2.	Komite TI & Operasi	2021	1. Andrew Bain*)	Ketua	23 Tahun	Pedoman Kerja Komite TI dan Operasi Perusahaan, yang terakhir kali diamandemen pada tanggal 23 Juni 2021	7 kali
			2. Wianto	Anggota	25 Tahun		
			3. Shinichiro Suzuki	Anggota	24 Tahun		
			4. Gideon	Anggota	26 Tahun		
			5. Herman Sulistyo	Anggota	24 Tahun		
			6. Satoshi Shiratani	Anggota	30 Tahun		
			7. Tomoyuki Monden	Anggota	23 Tahun		
			8. Himmia Bong	Anggota	27 Tahun		
			9. Ratna Kencana Putra	Anggota	19 Tahun		
			10. Yulia Andri Hartiana Dewi	Anggota	27 Tahun		
			11. Toru Nakabayashi	Ketua	17 Tahun		

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
			12. Aldhi Halim	Anggota	19 Tahun		
			13. Inge Wayan Tantri	Anggota	21 Tahun		

*) : Efektif menjabat sebagai Direktur pada tanggal 25 Mei 2021 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 Tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
3.	Komite Produk dan Pemasaran	2021	1. Tju Cunardi	Ketua	25 Tahun	Pedoman Kerja Komite Produk dan Pemasaran Perusahaan, yang terakhir kali diamandemen pada tanggal 23 Juni 2021	5 kali
			2. Wianto	Anggota	25 Tahun		
			3. Shinichiro Suzuki	Anggota	24 Tahun		
			4. Herman Sulistyo	Anggota	24 Tahun		
			5. Gideon	Anggota	26 Tahun		
			6. Satoshi Shiratani	Anggota	30 Tahun		
			7. Tomoyuki Monden	Anggota	23 Tahun		
			8. Andrew Bain*)	Anggota	23 Tahun		
			9. Ratna Kencana Putra	Anggota	19 tahun		
			10. Aditya Indrawanto	Anggota	17 Tahun		

*) : Efektif menjabat sebagai Direktur pada tanggal 25 Mei 2021 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 Tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

4.		2021	1. Shinichiro Suzuki	Ketua	24 Tahun		4 kali

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
	Komite Manajemen Risiko		2. Herman Sulistyo	Anggota	24 Tahun	Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko Perusahaan, yang terakhir kali diamandemen pada tanggal 15 Februari 2021	
			3. Tomoyuki Monden	Anggota	23 Tahun		
			4. Andrew Bain*)	Anggota	23 Tahun		
			5. Johana Louhenapessy	Anggota	19 Tahun		
			6. Alief Yanisa	Anggota	15 Tahun		
			7. Himmia Bong**)	Anggota	27 Tahun		
			8. Tju Cunardi	Anggota	25 Tahun		
			9. Daisuke Miyauchi	Anggota	11 Tahun		

*) : Efektif menjabat sebagai Direktur pada tanggal 25 Mei 2021 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 Tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

**) : Efektif sejak Oktober 2021

2) Komite di bawah Dewan Komisaris

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
1.	Komite Audit	2021	1. Nazly Parlindungan Siregar	Ketua	24 Tahun	Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 20 Oktober 2020	12 kali
			2. Okamoto Yoshiro	Anggota	17 Tahun		
			3. Adam Hartono	Anggota	16 Tahun		

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
2.	Komite Pemantau Risiko	2021	1. Sidharta Akmam	Ketua	35 Tahun	Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 20 Oktober 2020	4 kali
			2. Ardhayadi Mitroatmodjo	Anggota	47 Tahun		
			3. Johana Louhenapessy	Anggota	19 Tahun		
			4. Alief Yanisa	Anggota	15 Tahun		

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
3.	Komite Tata Kelola Perusahaan	2021	1. Toshinari Tokoi	Ketua	43 Tahun	Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Oktober 2020	4 kali
			2. Ardhayadi Mitroatmodjo	Anggota	47 Tahun		
			3. Nazly Parlindungan Siregar	Anggota	24 Tahun		
			4. Johana Louhenapessy	Anggota	19 Tahun		

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
4.		2021	1. Sidharta Akmam	Ketua	35 Tahun		4 kali

No.	Nama komite	Periode	Nama Anggota	Jabatan	Masa kerja	Dasar Pengangkatan	Jumlah Rapat Komite dalam Setahun
	Komite Nominasi dan Remunerasi		2. Indra Widjaja	Anggota	48 Tahun	Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 Oktober 2020	
			3. Toshinari Tokoi	Anggota	43 Tahun		
			4. Hideaki Nomura	Anggota	36 Tahun		
			5. Novelita Siregar	Anggota	29 Tahun		

g. Penerapan fungsi auditor eksternal.

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Nama Kantor Akuntan Publik	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)
2.	Nama Akuntan Publik	Hermawan Setiadi	Hermawan Setiadi	Hermawan Setiadi
3.	Periode Audit	2019	2020	2021
4.	Nomor RUPS	No.27/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019	RUPST 2020: No. 02/VI/2020	RUPST 2021: No. 21/V/2021

h. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah	Pegawai

Di atas Rp2 miliar	6	-	-	-
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar	1	2	-	-
Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar	-	1	-	-
Rp500juta ke bawah	-	3	2	-

Keterangan: *) yang diminta secara tunai

i. Alih Daya Pengelolaan Investasi

No	Jenis Investasi	Nama Perusahaan Alih Daya	Nilai Investasi	No. Perjanjian	% dari total Portofolio Investasi
1	Deposito	PT Ashmore Asset Management Indonesia	38,780,000,000	545820980476	0.79%
2	Deposito	PT Eastspring Investments Indonesia	9,000,000,000	545820979536	0.18%
3	Deposito	PT Eastspring Investments Indonesia	41,004,931,799	545820980492	0.84%
4	Deposito	PT Ashmore Asset Management Indonesia	5,000,000,000	545820969024	0.10%
5	Deposito	PT Ashmore Asset Management Indonesia	7,400,000,000	545820980484	0.15%
6	Deposito	Manulife Aset Manajemen Indonesia PT	11,000,000,000	AB171207	0.22%
7	Obligasi	PT Ashmore Asset Management Indonesia	44,639,520,000	Akta No.36, tgl 10 September 2021	0.91%
8	Obligasi	PT Ashmore Asset Management Indonesia	57,158,915,000	No.36, tgl 10 September 2021	1.17%
9	Reksadana	BNP Paribas Investment Partners	8,937,959,008	Tidak ada Nomor perjanjian karena merupakan Reksadana Open End Fund	0.18%
10	Reksadana	Insight Investment Management	46,893,342,418		0.96%
11	Reksadana	Majoris Asset Management	36,845,646,139		0.75%
12	Reksadana	PT Ashmore Asset Management Indonesia	46,824,821,130		0.96%
13	Reksadana	PT Bahana TCW Investment Management	29,189,026,215		0.60%
14	Reksadana	PT Pinnacle Persada Investama	51,070,464,362		1.04%
15	Reksadana	PT. Mandiri Manajemen Investasi	278,345,006,259		5.69%
16	Reksadana	Samuel Aset Managemen	11,420,951,950		0.23%
17	Reksadana	Schroder Investment Management Indonesia	2,774,267,203		0.06%

18	Reksadana	Sinarmas Asset Management	544,932,161,267		11.13%
19	Reksadana	Syailendra Capital	59,020,885,529		1.21%
20	Reksadana	Trimegah Asset Management	85,561,791,560		1.75%
21	Reksadana	Sucorinvest Asset Management	431,240,417,777		8.81%
22	Saham	PT Eastspring Investments Indonesia	840,740,350,985	Akta No.85, tgl 31 Mei 2021	17.17%
23	Saham	Manulife Aset Manajemen Indonesia PT	459,703,487,330	No.093/AGR/MAMI-INSTO/IX/2021	9.39%
24	Saham	PT Ashmore Asset Management Indonesia	1,747,714,531,490	No. ASJ: 075/AJSMSIG-LGL/ADD/XII/2021	35.70%
Total			4,895,198,477,420		100%

j. Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*)

No	Fungsi yg dialihdayakan	Nama Pihak lain	Izin Usaha	Jangka waktu kontrak
1.	Printing Polis	RDS	119/24.1PB.7/31.73/-1.824.27/e/2016	1 Desember 2018 sampai tidak terbatas
2.	Ekspedisi	PT. JNE	189/24.1PB.7/31.73/-1.824.27/e/2017	2 Januari 2018 sampai tidak terbatas
		PT. TIKI	693/24.1.o./31.71-04.1002/1.824.2712015/	15 Mei 2018 sampai tidak terbatas
3.	SMS Delivery	PT. Jatis Mobile (Informasi Teknologi Indonesia)	9120406801697	1 Desember 2014 sampai tidak terbatas
4.	Contact Center Technology (Centrix)	PT. Moxcal Teknologi Teknologi	9120304870263	1 Januari 2019 sampai tidak terbatas

5.	Officeboy, Messenger, Security	PT. Shield-On Service	8120000980466	8 Oktober 2007 sampai tidak terbatas
6.	Operational Expenses System	PT. Supersoft Sistemindo	9120 3099 12862	14 Desember 2018 – 14 Desember 2022
7.	Sun System (Accounting)	PT Supersoft Sistemindo	9120 3099 12862	14 Desember 2018 - 14 Desember 2022
8.	Input SPAJ Paper	RDS	119/24.1PB.7/31.73/-1.824.27/e/2016	1 November 2021 sampai tidak terbatas
9.	Employment Background Screening	PT Integrity Indonesia	8120315112923	9 November 2021 - 8 November 2023
10	IT Employee Contract Basis	PT Sigma Global Teknologi	1255000242468	21 September 21 (1 tahun & dapat diperbaharui)
11	IT Employee Contract Basis	PT. Adi Consulting	8120000711794	5 maret 2021 (1 tahun & dapat diperbaharui)

k. Pengungkapan hal-hal penting lainnya Pengungkapan hal-hal penting lainnya

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
1.	Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal		✓	
2.	Transaksi material dengan pihak terkait**		✓	
3.	Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan Perasuransian		✓	

No.	Uraian	Ceklis *)		Jika Ya, Jelaskan
		Ya	Tidak	
4.	Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi		✓	
5.	Informasi material lain mengenai Perusahaan Perasuransian		✓	
6.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan	✓		Fungsi kepatuhan dijalankan oleh Compliance Department yang merupakan bagian dari Divisi Compliance & Risk Management
7.	Perusahaan memiliki auditor internal	✓		Perusahaan memiliki Internal Audit Department yang dikepalai oleh Head of Internal Audit
8.	Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko	✓		Fungsi manajemen risiko dijalankan oleh Risk Management Department yang merupakan bagian dari Divisi Compliance & Risk Management
9.	Perusahaan memiliki fungsi/satuan kerja pengelolaan investasi	✓		Fungsi pengelolaan investasi dijalankan oleh Investment Planning & Management Department yang merupakan bagian dari Divisi Investment
10.	Perusahaan memiliki unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT	✓		Perusahaan telah memiliki Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) yang disahkan direksi berdasarkan SK Direksi No. 011/AJSMSIG-SK/IV/2020 dan dilakukan perubahan dengan SK Direksi No. 030/AJSMSIG-SK/IX/2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Implementasi Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

*) pilih salah satu jawaban dengan membubuhkan tanda "√"

**) Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan

2. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pengisian kuesioner Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan dilakukan oleh Perusahaan yang bersangkutan. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner dimaksud.

Cara Pengisian:

Secara Umum jawaban atas Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud terdiri dari 5 kriteria sebagai berikut (kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda) :

A= Perusahaan yang bersangkutan TIDAK MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud.

B= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan.

C= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, namun kebijakan tersebut BELUM dilaksanakan secara KONSISTEN.

D= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud, kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN namun BELUM DIUPDATE secara berkala.

E= Perusahaan yang bersangkutan MEMILIKI kebijakan tertulis mengenai Pertanyaan/Pernyataan yang dimaksud dan kebijakan tersebut DILAKSANAKAN secara KONSISTEN serta DIUPDATE secara berkala.

Penafsiran Hasil

Suatu penilaian diperlukan untuk menafsirkan angka yang diperoleh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Kuesioner ini, yang sebagian besar jawabannya adalah terdiri dari 5 (lima) skala mulai dari penilaian terendah (A/ Tidak), sampai dengan penilaian tertinggi (E/ Ya).

Khusus untuk jawaban " A/Tidak" pada kriteria penilaian yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan (bersifat wajib), diberikan angka minus.

Untuk kelompok Pertanyaan/Pernyataan yang dilewatkan karena "Tidak ada" dan yang bukan bersifat "tidak applicable", dalam penafsiran hasil harus tetap diperhitungkan dengan memberikan score yang sama dengan jawaban " A/Tidak ".

I. ETIKA BISNIS DAN PEDOMAN PERILAKU

1.	Perusahaan memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.	Perusahaan memiliki Kebijakan Etika Bisnis yang antara lain meliputi :					
2.1.	Kebijakan umum yang mengarah kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.2.	Kebijakan bagi organ perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.3.	Kebijakan bagi pegawai	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.4.	Kebijakan bagi pemegang polis	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.5.	Kebijakan bagi mitra usaha	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.6.	Kebijakan bagi sesama perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang merupakan penjabaran Nilai-nilai Perusahaan dan Etika Bisnis	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang :					
4.1.	Benturan kepentingan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.2.	Pemberian hadiah dan donasi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.3.	Kepatuhan terhadap peraturan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.4.	Kerahasiaan informasi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.5.	Pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.	Dalam menjalankan tugasnya, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perusahaan:					
5.1.	Membuat pernyataan "tidak memiliki benturan kepentingan" terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan	**Tidak**			**Ya**	
5.2.	Membuat pernyataan setiap tahun mengenai pelaksanaan pedoman perilaku yang ditetapkan perusahaan	**Tidak**			**Ya**	
5.3.	Membuat pernyataan setiap tahunnya untuk tidak menerima dan atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan	**Tidak**			**Ya**	

6.	Perusahaan melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal sendiri (ekuitas) secara benar dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum maupun prinsip akuntansi yang berlaku khusus bagi perusahaan	**Tidak** / **Ya**
7.	Mempunyai sistem pengaduan tentang pelanggaran terhadap pedoman perilaku, peraturan Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hal-hal yang berkaitan dengan Pemegang Polis yang menjamin perlindungan bagi Pelapor.	**A** **B** **C** **D** **E**

II. ORGAN PERUSAHAAN

A. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1.	Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS	**A** **B** **C** **D** **E**
2.	Kebijakan Perusahaan tentang penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	**A** **B** **C** **D** **E**
3.	Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS	**Tidak** / **Ya**
4.	Penjelasan lengkap dan informasi tersebut meliputi hal-hal berikut ini:	
	4.1. Panggilan RUPS	**Tidak** / **Ya**
	4.2. Informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS	**Tidak** / **Ya**
	4.3. Tersedianya informasi di kantor pusat Perusahaan	**Tidak** / **Ya**
	4.4. Komitmen diselenggarakannya RUPS secara transparan	**Tidak** / **Ya**
	4.5. Pemberitahuan kepada setiap pemegang saham mengenai hasil RUPS	**Tidak** / **Ya**
5.	Dalam pengambilan keputusan RUPS :	
	5.1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat telah lulus Fit and Proper Test bagi Perusahaan	**Tidak** / **Ya**

5.2.	Mempertimbangkan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi atau fungsi yang menangani Nominasi dan Remunerasi dalam pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.3.	Mempertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.4.	Melakukan penetapan auditor eksternal	**Tidak**			**Ya**	
5.5.	Keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan wajar dari para pemangku kepentingan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.6.	Memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan dalam hal pemberian bonus, tantiem, dan dividen	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

B. Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing telah melaksanakan hal-hal di bawah ini:

1.1.	Internal Control	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.2.	manajemen risiko	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.3.	imbal hasil (return) yang wajar bagi Pemegang Saham	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.4.	kebijakan yang terkait kepentingan stakeholders	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.5.	suksesi kepemimpinan dan kontinyuitas manajemen di semua lini organisasi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.6.	implementasi GCG	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

2. Dewan Komisaris dan Direksi bersama-sama menyepakati hal-hal tersebut di bawah ini:

2.1.	Sasaran usaha Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.2.	Rencana jangka panjang perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.3.	Rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.4.	Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

2.5.	Kebijakan dalam menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.6.	Kebijakan dan metode penilaian Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.7.	Kebijakan dan metode penilaian unit-unit dalam perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.8.	Struktur organisasi pada tingkat eksekutif	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

C. Dewan Komisaris

1. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

1.1.	Jumlah anggota Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan namun tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan	**Tidak**	**Ya**
1.2.	Dalam komposisi Dewan Komisaris termasuk komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen	**Tidak**	**Ya**
1.3.	Pengangkatan Komisaris Independen sesuai ketentuan yang berlaku	**Tidak**	**Ya**
1.4.	Dewan Komisaris terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi seperti *)		
	a. bidang asuransi	**Tidak**	**Ya**
	b. bidang keuangan	**Tidak**	**Ya**
	c. bidang manajemen	**Tidak**	**Ya**
1.5.	Mempunyai Komisaris Utusan, selain Komisaris Independen	**Tidak**	**Ya**
1.6.	Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai proses yang transparan berdasarkan alasan yang wajar dan diberi kesempatan membela diri	**Tidak**	**Ya**
1.7.	Tidak merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usaganya berdasarkan Prinsip Syariah yang sama	**Tidak**	**Ya**
1.8.	Tidak merangkap jabatan lebih dari 4 (empat) Lembaga Jasa Keuangan lainnya	**Tidak**	**Ya**

1.9.	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS pada Perusahaan Perasuransian yang memilki bidang usaha yang sama	**Tidak**				**Ya**
2.	**Kemampuan dan Integritas Dewan Komisaris**					
2.1.	Memenuhi persyaratan Fit and Proper Test	**Tidak**				**Ya**
2.2.	Mematuhi dan memahami Anggaran Dasar Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.3.	Mematuhi dan melaksanakan GCG	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.4.	Tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya atau pihak lain yang dapat merugikan perusahaan	**Tidak**				**Ya**
3.	**Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris**					
3.1.	Dewan Komisaris mengawasi kepengurusan Perusahaan oleh Direksi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.2.	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.3.	Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi pada Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan RUPS	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.4.	Dewan Komisaris memperoleh informasi tentang Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.5.	Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib dan Pedoman Kerja (*charter*)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.6.	Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.7.	Dewan Komisaris melaporkan tanggung jawab pengawasannya dan mendapatkan acquit et decharge dari RUPS	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.8.	Dewan Komisaris mengadakan rapat secara berkala	**Tidak**				**Ya**
3.9.	Setiap rapat Dewan Komisaris dibuat risalah rapat	**Tidak**				**Ya**

3.10.	Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan keputusan yang diambil dalam rapat (bila ada)	**A B C D E**
3.11.	Setiap anggota Dewan Komisaris baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima risalah rapat Dewan Komisaris	**Tidak Ya**

4. Komite-Komite Dewan Komisaris (dijawab jika ada)

4.1. Komite Audit — **Tidak Ada** — **lanjutkan ke 4.1.8.**

4.1.1.	Struktur pengendalian internal Perusahaan dilaksanakan dengan baik	**A B C D E**
4.1.2.	Audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	**A B C D E**
4.1.3.	Tindaklanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh manajemen	**A B C D E**
4.1.4.	Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku	**Tidak Ya**
4.1.5.	Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh manajemen	**A B C D E**
4.1.6.	Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan	**A B C D E**
4.1.7.	Anggota Komite Audit terdiri dari :	
	a. seorang Komisaris Independen sebagai Ketua	**Tidak Ya**
	b. anggota Dewan Komisaris	**Tidak Ya**
	c. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman, serta kualitas lain yang diperlukan	**Tidak Ya**
4.1.8.	Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Audit, maka terdapat anggota komisaris yang secara khusus bertugas untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:	

a. Struktur pengendalian internal Perusahaan telah dapat dilaksanakan dengan baik **A B C D E**

b. Pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku **A B C D E**

c. Tindak lanjut temuan hasil audit internal dilaksanakan oleh Manajemen **A B C D E**

d. Pelaksanaan audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku **Tidak** **Ya**

e. Tindak lanjut temuan hasil audit eksternal dilaksanakan oleh Manajemen **A B C D E**

f. Meningkatnya kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan **A B C D E**

4.2. Komite Kebijakan Risiko **Tidak Ada** **lanjutkan ke 4.2.4.**

Komite Kebijakan Risiko bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini:

4.2.1. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko **A B C D E**

4.2.2. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi **A B C D E**

4.2.3. Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari:

a. anggota Dewan Komisaris **Tidak** **Ya**

b. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman dan kualitas lain dalam mengelola manajemen risiko	**Tidak**				**Ya**

4.2.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan Risiko, terdapat anggota komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Menilai kualitas kebijakan manajemen risiko	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
b. Menilai efektivitas manajemen risiko yang diterapkan perusahaan, termasuk menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

4.3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Tidak Ada **lanjutkan ke 4.2.11.**

Komite Nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris untuk hal-hal berikut ini:

4.3.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.3.2. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.3.3. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.3.4. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.3.5. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

4.3.6.	Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.3.7.	Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.3.8.	Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.3.9.	Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.3.10.	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:					
	a. anggota Dewan Komisaris	**Tidak**			**Ya**	
	b. pihak luar yang independen yang memiliki keahlian,pengalaman dan kualitas lain yang diperlukan	**Tidak**			**Ya**	
4.3.11.	Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Nominasi dan remunerasi, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut :					
	a. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Dewan Komisaris	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
	b. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Direksi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
	c. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi pejabat senior Perusahaan.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
	d. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih komisaris sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

e. Membantu Dewan Komisaris dan atau pemegang saham dalam memilih anggota direksi sehingga memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. **A B C D E**

f. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Komisaris **A B C D E**

g. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Direksi. **A B C D E**

h. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris **A B C D E**

i. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Direksi **A B C D E**

4.4. Komite Kebijakan Corporate Governance **Tidak Ada** **lanjutkan ke 4.4.4.**

Komite Kebijakan Corporate Governance (yang berdiri sendiri maupun yang tergabung dalam Komite Nominasi dan Remunerasi) bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal berikut:

4.4.1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun Direksi **A B C D E**

4.4.2. Menilai kesesuaian penerapan GCG di Perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR **A B C D E**

4.4.3. Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari:

a. Anggota Dewan Komisaris **Tidak** **Ya**

b. Pihak luar yang independen yang mempunyai keahlian, pengalaman dan kualitas di bidang corporate governance **Tidak** **Ya**

4.4.4. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki Komite Kebijakan Corporate Governance, terdapat anggota Komisaris yang secara khusus bertugas untuk hal-hal sebagai berikut:

a.	Mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun Direksi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
b.	Menilai kesesuaian penerapan GCG di Perusahaan terhadap kebijakan GCG yang disusun Direksi, termasuk yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan CSR	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

5. Komisaris Independen

Perusahaan memiliki Komisaris Independen dengan kriteria-kriteria berikut ini :

5.1.	Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Pemegang Saham pengendali Perusahaan	**Tidak**	**Ya**
5.2.	Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Direktur Perusahaan	**Tidak**	**Ya**
5.3.	Tidak memiliki hubungan afiliasi *) dengan Komisaris lainnya	**Tidak**	**Ya**
5.4.	Tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir	**Tidak**	**Ya**
5.5.	Tidak menduduki jabatan eksekutif di Perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengan Perusahaan	**Tidak**	**Ya**
5.6.	Tidak pernah menduduki jabatan Eksekutif pada Perusahaan lain yang terafiliasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir	**Tidak**	**Ya**
5.7.	Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada Perusahaan dan perusahaan - perusahaan lain yang terafiliasi	**Tidak**	**Ya**
5.8.	Tidak menjadi pemasok signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok	**Tidak**	**Ya**
5.9.	Tidak menjadi pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pelanggan signifikan dari Perusahaan	**Tidak**	**Ya**

5.10.	Tidak menjadi pemasok signifikan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan komisaris perusahaan pemasok dari Perusahaan yang terafiliasi	**Tidak**				**Ya**
5.11.	Tidak menjadi pelanggan signifikan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau menduduki jabatan eksekutif dan Komisaris Perusahaan pelanggan dari Perusahaan yang terafiliasi	**Tidak**				**Ya**
5.12.	Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan lain dengan perusahaan yang dapat diintepretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan Perusahaan	**Tidak**				**Ya**
5.13.	Memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.14.	Memahami Undang-Undang Perasuransian serta peraturan pelaksanaannya	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.15.	Tidak bekerja rangkap sebagai Komisaris, Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memiliki bidang usaha yang sama	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

D. Direksi

1. Komposisi Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

1.1.	Direksi terdiri dari anggota-anggota yang secara keseluruhan memiliki kompetensi *)seperti :		
	a. Bidang Asuransi	**Tidak**	**Ya**
	b. Bidang Keuangan	**Tidak**	**Ya**
	c. Bidang Manajemen	**Tidak**	**Ya**
1.2.	Domisili Anggota Direksi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif.	**Tidak**	**Ya**
1.3.	Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui mekanisme yang transparan	**Tidak**	**Ya**

2. Persyaratan Anggota Direksi

2.1.	Anggota Direksi memenuhi ketentuan anggaran dasar		**Tidak**		**Ya**	
2.2.	Anggota Direksi memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan otoritas pembina dan pengawas		**Tidak**		**Ya**	
2.3.	Anggota Direksi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.4.	Anggota Direksi harus memahami dan melaksanakan GCG	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.5.	Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau pihak lain yang merugikan kepentingan perusahaan		**Tidak**		**Ya**	
2.6.	Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Perasuransian dengan bidang usaha yang berbeda		**Tidak**		**Ya**	
2.7.	Selain Direktur Utama tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Perasuransian dengan bidang usaha yang berbeda yang bukan merupakan Perusahaan anak		**Tidak**		**Ya**	
2.8.	Direksi tidak merangkap jabatan pada perusahaan yang bukan Perusahaan Perasuransian		**Tidak**		**Ya**	

3. Fungsi Direksi

3.1. Kepengurusan

3.1.1.	Direksi menyusun Visi, Misi dan Nilai2 Perusahaan serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.1.2.	Direksi mengelola sumber daya yang dimiliki , secara efektif dan efisien, termasuk memastikan dimilikinya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu untuk menjalankan fungsinya	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

3.1.3.	Direksi memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.1.4.	Direksi membentuk Komite untuk mendukung pelaksanaan tugasnya	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.1.5.	Direksi memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman kerja (*charter*)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.2.	**Manajemen Risiko**					
3.2.1.	Direksi menyusun dan melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.2.2.	Perusahaan memiliki Komite Kebijakan Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	**Tidak**			**Ya**	
3.3.	**Pengendalian Internal**					
3.3.1.	Perusahaan memiliki fungsi pengawasan internal	**Tidak**			**Ya**	
3.3.2.	Bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan internal	**Tidak**			**Ya**	
3.3.3.	Menembuskan laporannya kepada Dewan Komisaris/Komite Audit.	**Tidak**			**Ya**	
3.3.4.	Kepala Satuan Kerja Auditor Internal diangkat Direksi, berdasarkan kriteria yang jelas	**Tidak**			**Ya**	
3.3.5.	Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Auditor Internal mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris	**Tidak**			**Ya**	
3.3.6.	Satuan Kerja Auditor Internal bertugas untuk memastikan sistem pengendalian internal berfungsi secara efektif dan efisien	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.3.7.	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

3.3.8.	Memastikan Sistem Pengendalian Internal berfungsi secara efektif dan efisien	**A B C D E**
3.3.9.	Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko	**A B C D E**
3.3.10.	Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan, pelaksanaan GCG dan peraturan Perusahaan	**A B C D E**
3.3.11.	Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal.	**A B C D E**
3.4.	**Komunikasi**	
3.4.1.	Perusahaan memiliki Sekretaris Perusahaan yang melaksanakan komunikasi antara Perusahaan dengan stakeholders	**Tidak Ada lanjutkan ke 3.4.2 Ya** / **Ya**
3.4.2.	Dalam hal kompleksitas Perusahaan belum mengharuskan diangkatnya Sekretaris Perusahaan, maka fungsi komunikasi dijabat oleh salah seorang anggota Direksi	**Tidak** / **Ya**
3.4.3.	Sekretaris Perusahaan harus mampu :	
	a. Memastikan Perusahaan telah memenuhi ketentuan penyampaian informasi sesuai peraturan perundang-undangan	**A B C D E**
	b. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan atas setiap informasi relevan yang dibutuhkan	**A B C D E**
3.4.4.	Laporan Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris	**Tidak** / **Ya**
3.4.5.	Sekretaris Perusahaan melaksanakan fungsi untuk menjamin kepatuhan pada peraturan perundangan dalam hal Perusahaan	**Tidak** / **Ya**

	tidak memiliki satuan kerja kepatuhan (*compliance committee*) tersendiri.		
3.5.	**Aktuaria**		
3.5.1.	Perusahaan memiliki Aktuaris yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut		
	a. Aktuaris yang ditunjuk memiliki kualifikasi dan standar sesuai yang ditetapkan yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Lembaga Profesi Aktuaris.	**Tidak**	**Ya**
	b. Aktuaris Perusahaan memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.	**Tidak**	**Ya**
	c. Aktuaris yang ditunjuk dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar praktik dan kode etik profesi yang berlaku.	**Tidak**	**Ya**
3.5.2.	Perusahaan harus menunjuk perusahaan konsultan aktuaria untuk melakukan evaluasi kewajiban Perusahaan	**Tidak**	**Ya**
3.6.	**Investasi**		
3.6.1.	Investasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan hasil yang optimal, mudah dicairkan dan aman bagi Perusahaan.	**A B C D E**	
3.6.2.	Perusahaan memiliki Komite Investasi untuk membantu Direksi	**Tidak**	**Ya**
3.6.3.	Komite Investasi menjalankan tugas secara obyektif berdasarkan arahan Direksi	**A B C D E**	
3.6.4.	Komite Investasi membantu Direksi dalam menilai dan menetapkan strategi investasi yang direncanakan	**A B C D E**	
3.6.5.	Komite Investasi membantu Direksi dalam menjaga likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban	**A B C D E**	
3.6.6.	Perusahaan memiliki fungsi pengelolaan Investasi	**Tidak**	**Ya**

3.7. Pemasaran

3.7.1.	Perusahaan memiliki Program Promosi (*media plan*) yang intinya mengungkapkan informasi yang jelas dan relevan, tidak menyesatkan serta mematuhi kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku	**Tidak** / **Ya**
3.7.2.	Perusahaan menerbitkan brosur yang memuat penjelasan lengkap dan jelas tentang produk yang dijual ke masyarakat luas	**Tidak** / **Ya**
3.7.3.	Perusahaan memiliki agen dan sistem keagenan	**Tidak** / **Ya**
3.7.4.	Perusahaan memilki kontrak keagenan yang baku	**Tidak** / **Ya**
3.7.5.	Perusahaan memastikan bahwa seluruh agen wajib memiliki sertifikasi keagenan dan pelatihan seperti yang dipersyaratkan	**A** **B** **C** **D** **E**
3.7.6.	Perusahaan memilki dan menerapkan Kode Etik Keagenan dalam pemasaran produknya	**Tidak** / **Ya**
3.7.7.	Perusahaan memiliki kerjasama dengan broker asuransi	**Tidak** / **Ya**
3.7.8.	Perusahaan telah memanfaatkan media elektronik untuk melaksanakan kegiatan pemasaran.	**Tidak** / **Ya**

3.8. Teknologi Informasi (TI)

3.8.1.	Perusahaan memiliki sistem komputerisasi administrasi secara terpadu	**A** **B** **C** **D** **E**
3.8.2.	Perusahaan memilki sistem komputerisasi untuk menghitung besarnya akumulasi risiko dan cadangan teknis.	**A** **B** **C** **D** **E**
3.8.3.	Perusahaan memiliki unit khusus untuk menangani TI yang berdiri sendiri dibawah supervisi seorang Direktur	**Tidak** / **Ya**
3.8.4.	Perusahaan memiliki Standard Operating Procedures untuk bagian TI	**A** **B** **C** **D** **E**

3.8.5.	Perusahaan melakukan audit TI secara berkala	**Tidak**				**Ya**			
3.8.6.	Perusahaan memiliki pengaturan tanggung jawab yang jelas atas penggunaan Teknologi Informasi.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**			
3.9.	**Tanggung Jawab Sosial**								
3.9.1.	Perusahaan mempunyai program tanggung jawab sosial secara berkelanjutan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**			
3.9.2.	Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial disampaikan Direksi dalam Laporan Tahunan	**Tidak**				**Ya**			
4.	**Pertanggungjawaban Direksi**								
4.1.	Direksi menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan dalam bentuk Laporan Tahunan	**Tidak**				**Ya**			
4.2.	Kriteria Laporan Tahunan antara lain :								
4.2.1	Memuat sekurang-kurangnya :								
	a. Laporan keuangan	**Tidak**				**Ya**			
	b. Laporan kegiatan Perusahaan	**Tidak**				**Ya**			
	c. Laporan pelaksanaan GCG	**Tidak**				**Ya**			
4.2.2.	Mendapat persetujuan RUPS	**Tidak**				**Ya**			
4.2.3.	Khusus laporan keuangan harus mendapat pengesahan RUPS	**Tidak**				**Ya**			
4.2.4.	Harus tersedia sebelum RUPS dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga Pemegang Saham dapat melakukan penilaian	**Tidak**				**Ya**			
4.3.	Rapat Direksi								
4.3.1	Direksi mengadakan rapat secara berkala	**Tidak**				**Ya**			
4.3.2.	Direksi menetapkan tata tertib rapat	**Tidak**				**Ya**			
4.3.3.	Setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat	**Tidak**				**Ya**			

4.3.4.	Risalah rapat mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan keputusan yang diambil dalam rapat (bila ada)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.3.5.	Setiap anggota Direksi baik yang menghadiri rapat atau tidak berhak menerima Risalah Rapat Direksi	**Tidak**			**Ya**	

III. PEMEGANG SAHAM

1. Persyaratan Pemegang Saham

1.1.	Pemegang Saham pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan	**Tidak**	**Ya**
1.2.	Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan setiap saat apabila Pemegang Saham pengendali tersebut patut diduga tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan kemampuan dan kepatutan berdasarkan hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan atau pengaduan	**Tidak**	**Ya**
1.3.	PSP tidak menjadi PSP pada 1 (satu) Perusahaan lain yang merupakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang memiliki bidang usaha yang sama	**Tidak**	**Ya**

2. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

2.1.	Perusahaan menjamin hak-hak Pemegang Saham, sehingga Pemegang Saham dapat menggunakannya berdasarkan prosedur yang benar	**Tidak**	**Ya**
2.2.	Apakah hak-hak Pemegang Saham yang dijamin oleh Perusahaan meliputi namun tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:		
	a. Hak untuk hadir dalam RUPS	**Tidak**	**Ya**
	b. Hak untuk memberikan suara dalam suatu RUPS	**Tidak**	**Ya**
	c. Hak untuk memperoleh informasi material secara tepat waktu	**Tidak**	**Ya**
	d. Hak untuk memperoleh informasi material secara teratur	**Tidak**	**Ya**

	e. Hak untuk menerima sebagian dari laba yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya	**Tidak**			**Ya**	
3.	**Kewajiban Pemegang Saham**					
3.1.	Pemegang Saham mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.2.	Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan pengawasan Perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.3.	Pemegang Saham tidak melakukan kegiatan kepengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.4.	Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat di industri perasuransian	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.5.	Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan keluarga dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.6.	Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dengan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.7.	Pemegang Saham diwajibkan untuk tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.8.	Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris melalui mekanisme RUPS	**Tidak**			**Ya**	
3.9.	Pemegang Saham melakukan evaluasi kinerja Direksi melalui mekanisme RUPS	**Tidak**			**Ya**	
4.	**Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham**					

4.1.	Perusahaan melindungi hak pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan lainnya	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.2.	Perusahaan menyelenggarakan daftar pemegang saham sesuai anggaran dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.3.	Perusahaan menyediakan informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.4.	Perusahan tidak memihak pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan ke pemegang saham lainnya	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.5.	Perusahaan memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

IV. PEMANGKU KEPENTINGAN

A. Pemegang Polis

1. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan:

1.1.	Kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis.	**Tidak**			**Ya**	
1.2.	Perlindungan kepentingan pemegang polis.	**Tidak**			**Ya**	
1.3.	Perlindungan kerahasiaan pemegang polis.	**Tidak**			**Ya**	
1.4.	Evaluasi kebutuhan pemegang polis.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.5.	Pengungkapan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.6.	Pelayanan terhadap pemegang polis berdasarkan prinsip utmost good faith dengan integritas dan kompetensi yang tinggi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.7.	Penunjukan adjuster bersama-sama pemegang polis bila diperlukan.	**Tidak**			**Ya**	

2. Perusahaan memastikan bahwa pemegang polis

2.1.	Menyampaikan informasi kepada Perusahaan secara jujur terkait data tertanggung dan obyek risiko	**Tidak**	**Ya**
2.2.	Membayar premi tepat waktu	**Tidak**	**Ya**
2.3.	Melaporkan klaim ke Perusahaan sesuai prosedur	**Tidak**	**Ya**
2.4.	Memberi kesempatan untuk melakukan survey dan bekerjasama dengan adjuster	**Tidak**	**Ya**

B. Pegawai

1. Pegawai harus memenuhi dan melaksanakan :

1.1.	Penerimaan pegawai atas dasar kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait sifat pekerjaan secara taat azas	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.2.	Hal-hal berikut secara obyektif tanpa membedakan SARA, jenis kelamin dan kondisi fisik seseorang :					
1.2.1.	Pola penetapan remunerasi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.2.2.	Mengikutsertakan dalam pelatihan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.2.3.	Penetapan jenjang karir	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.2.4.	Penetapan persyaratan kerja	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.3.	Mempunyai peraturan tertulis yang mengatur pola rekrutmen serta hak dan kewajiban pegawai	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.4.	Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.5.	Menyediakan sarana komunikasi untuk penyampaian informasi bagi pegawai	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.6.	Memberikan peluang kepada pegawai untuk membentuk Serikat Pekerja dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

2. Perusahaan harus memenuhi dan melaksanakan :

2.1.	Kewajiban sebagaimana diatur jelas dalam peraturan Perusahaan dan atau Perjanjian Kerja Bersama	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

2.2.	Larangan untuk tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik Perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.3.	Hak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.4.	Pelaporan pelanggaran atas Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku serta peraturan perundangan yang terkait dengan Perusahaan dengan hak mendapat perlindungan sebagai pelapor.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

C. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Lain

1.	Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi melakukan persaingan usaha secara sehat	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.	Dalam hal terjadi hubungan bisnis, para pihak harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang meliputi namun tidak terbatas pada :					
2.1.	Ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.2.	Pengungkapan dan penyampaian informasi dan data yang relevan dan akurat	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.3.	Pelaksanaan komitmen dalam memenuhi kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian dan peraturan perundangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Perusahaan memiliki *coverage* otomatis dari perusahaan reasuransi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	Perusahaan memiliki retensi sendiri untuk setiap penutupan risiko yang besarnya didasarkan atas modal sendiri (ekuitas) dan profil risiko yang bersangkutan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.	Setiap penutupan reasuransi yang bersifat otomatis (*treaty*) didasarkan pada perjanjian yang disepakati oleh perusahaan dan perusahaan reasuransi yang bersangkutan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

D. Perusahaan Penunjang

1. Hubungan dengan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi

Dalam hubungan dengan pialang asuransi dan pialang reasuransi, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1.1.	Perusahaan melaksanakan akseptasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan menyelesaikan klaim sesuai perjanjian	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1.2.	Perusahaan memastikan bahwa pialang:					
1.2.1.	memiliki ijin usaha dari otoritas dan kompetensi yang dibuktikan dengan adanya pengakuan dari lembaga profesi pialang	**Tidak**			**Ya**	
1.2.2.	menyampaikan semua informasi yang relevan kepada Perusahaan secara benar, jujur dan lengkap	**Tidak**			**Ya**	
1.2.3.	melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan	**Tidak**			**Ya**	

2. Hubungan dengan Penilai Kerugian Asuransi

Dalam berhubungan dengan penilai kerugian asuransi (adjuster), Perusahaan berpedoman pada hak-hak sebagai berikut:

2.1.	Perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang kondisi polis dan memberikan data secara lengkap dan akurat berkaitan dengan terjadinya suatu klaim	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.2	Perusahaan memastikan bahwa penilai kerugian:					
2.2.1.	Mengetahui dan memahami persyaratan polis yang diperjanjikan antara Perusahaan dengan pemegang polis	**Tidak**			**Ya**	
2.2.2.	Menggunakan persyaratan dan kondisi polis sebagai dasar untuk menentukan dijamin atau tidaknya kerugian yang terjadi	**Tidak**			**Ya**	
2.2.3.	Mengambil kesimpulan atas pemeriksaaan dan penelitian secara kompeten dan independen mewakili kepentingan Perusahaan dan pemegang polis	**Tidak**			**Ya**	
2.2.4.	Mengungkapkan semua informasi yang penting mengenai terjadinya kerugian dan penyebabnya, sesuai fakta yang diketahui secara wajar tanpa berpihak ke kedua belah pihak	**Tidak**			**Ya**	

2.2.5.	Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan, perjanjian, dan ketentuan peraturan perundang-undangan	**Tidak**			**Ya**	

3. Hubungan dengan Konsultan Aktuaria

Dalam berhubungan dengan konsultan aktuaria, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

3.1.	Perusahaan mengungkapkan data dan informasi yang akurat sebagaimana diperlukan oleh konsultan aktuaria dalam melaksanakan tugasnya serta melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.2	Perusahaan memastikan konsultan aktuaria yang ditunjuk:					
3.2.1.	Memiliki integritas dan reputasi yang baik dan diakui lembaga yang berwenang	**Tidak**			**Ya**	
3.2.2.	Independen terhadap Perusahaan dan bebas dari kepentingan pemegang saham	**Tidak**			**Ya**	
3.2.3.	Membuat laporan dan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan standar praktek dan kode etik profesi yang berlaku	**Tidak**			**Ya**	
3.2.4.	Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan	**Tidak**			**Ya**	

4. Hubungan dengan Agen Asuransi

Dalam berhubungan dengan agen asuransi, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

4.1.	Perusahaan melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian keagenan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.2.	Mencantumkan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi asuransi yang bersangkutan dalam perjanjian keagenan berikut sangsi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran	**Tidak**			**Ya**	
4.3.	Memastikan bahwa agen yang ditunjuk:					
4.3.1.	Kompeten dalam mewakili Perusahaan dalam menjual produk dan memberikan pelayanan asuransi yang dibuktikan dari adanya sertifikat dari lembaga yang berwenang	**Tidak**			**Ya**	

4.3.2.	Menerima pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dari Perusahaan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya	**Tidak**	**Ya**
4.3.3.	Menandatangani, melaksanakan dan mematuhi perjanjian keagenan dengan Perusahaan	**Tidak**	**Ya**
4.3.4.	Melaksanakan pembayaran premi pemegang polis kepada Perusahaan sesuai perjanjian	**Tidak**	**Ya**
4.3.5	Melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian	**Tidak**	**Ya**

4.4. Perusahaan menyediakan alat bantu pengawasan, meliputi namun tidak terbatas pada:

4.4.1.	Mewajibkan semua Agen untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka telah membaca dan memahami kode etik yang berlaku.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.4.2.	Membentuk sales *compliance department* yang terkait dengan penjualan produk, langsung di bawah pengawasan salah seorang Direktur	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.4.3.	Mewajibkan sales *compliance department* memberikan laporan secara berkala kepada Direksi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.4.4.	Direksi wajib melaporkan kepada asosiasi terkait setiap pelanggaran kode etik yang terjadi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

5. Mitra Bisnis

Mitra Bisnis adalah pemasok, distributor, kreditor, debitur, dan pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan

Dalam hubungan dengan mitra bisnis, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

5.1.	Memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.2.	Memastikan bahwa Perusahaan dan mitra bisnis:					
5.2.1.	Saling memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis yang dilakukan, sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar	**Tidak**			**Ya**	
5.2.2.	Saling merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak, kecuali dipersyaratkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan	**Tidak**			**Ya**	
5.2.3.	Saling melaksanakan hubungan kerja sesuai nilai-nilai etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan	**Tidak**			**Ya**	

6. Masyarakat

Dalam berhubungan dengan masyarakat, Perusahaan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

6.1.	Memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara Perusahaan dengan masyarakat, termasuk program kemitraan dan bina lingkungan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.2.	Perusahaan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan Perusahaan terhadap masyarakat	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

V. PRAKTIK-PRAKTIK USAHA YANG SEHAT

A. Underwriting

1.	Perusahaan memiliki kebijakan *underwriting* yang dituangkan secara rinci dalam Pedoman *Underwriting*	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.	Pedoman *Underwriting* memuat kebijakan teknis akseptasi, batasan kewenangan untuk setiap *underwriter*, *pricing* serta kapasitas pertanggungan asuransi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Dalam melakukan underwriting yang prudent, Perusahaan:					
3.1.	Menerapkan prinsip-prinsip dasar asuransi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.2.	Memperhatikan faktor-faktor yang mendukung proses pelaksanaannya, seperti: survey risiko, penentuan tarif premi dan penentuan nilai pertanggungan.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.3.	Mematuhi peraturan perundang-undangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	Perlindungan (*coverage*) yang diberikan oleh Perusahaan harus jelas dan mudah dipahami untuk mencegah terjadinya dispute di kemudian hari serta memberi manfaat sebagaimana yang dibutuhkan oleh pemegang polis.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

B. Klaim

1.	Perusahaan menginformasikan kepada pemegang polis tentang tata cara penyelesaian klaim asuransi	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.	Memastikan Perusahaan mendapatkan informasi tentang tata cara dan persyaratan pengajuan klaim reasuransi oleh	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi yang terkait dengan pertanggungan ulang yang dilakukan Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	Perusahaan menggunakan jasa penilai kerugian (*adjuster*) independen apabila diperlukan	**Tidak**			**Ya**	
5.	Kebijakan penanganan klaim dituangkan secara rinci dalam Pedoman Penyelesaian Klaim Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

6.	Perusahaan mengupayakan penyelesaian klaim secara cepat dan pembayaran tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
C.	**Reasuransi dan retrosesi**					
1.	Perusahaan melakukan pertanggungan ulang (reasuransi/retrosesi) untuk risiko yang melebihi atau di luar batas kemampuan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.	Pelaksanaan reasuransi/retrosesi didasarkan pada kesepakatan tertulis antara Perusahaan dengan penanggung ulang, baik yang bersifat fakultatif maupun *treaty*	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
D.	**Kepatuhan**					
1.	Perusahaan memiliki fungsi kepatuhan	**Tidak**			**Ya**	
2.	Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan (*compliance*) terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, kebijakan internal serta perjanjian yang disepakati dengan pihak lain	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Perusahaan menjalankan fungsi kepatuhan terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	Direksi bertugas untuk melakukan fungsi kepatuhan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.	Dewan Komisaris memonitor pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui Komite Pemantau Risiko atau Komite Kepatuhan yang khusus dibentuk	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.	Informasi mengenai ketidakpatuhan berupa penyimpangan-penyimpangan dan atau kecurangan-kecurangan yang terjadi ditampung melalui mekanisme Sistem Pelaporan pelanggaran	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
7.	Perusahaan memiliki Direktur Kepatuhan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
8.	Direktur yang membawahi fungsi teknik kepatuhan tidak merangkap teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
E.	**Manajemen Risiko**					
1.	Perusahaan memiliki fungsi manajemen risiko	**Tidak**			**Ya**	

2.	Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang menjabarkan prinsip-prinsip utama dan penetapan tanggung jawab diantara semua aspek kegiatan yang meliputi:					
	2.1. Sistem yang efisien dalam mengidentifikasi, menilai, mengukur, mengendalikan, mengurangi, dan memonitor risiko	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
	2.2. Strategi dan kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memastikan dipenuhinya kebijakan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
	2.3. Sistem Pengendalian internal yang memadai untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat dilaksanakan dengan baik	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
	2.4. Tenaga pelaksana Manajemen Risiko yang berintegritas tinggi, kompeten, berpengalaman, memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Perusahaan mengembangkan kerangka dasar strategi Asset and *Liability Management* (ALM) yang dilaksanakan pada komite tingkat Direksi. Tugas penting dari Komite tersebut adalah membahas produk baru yang akan dipasarkan oleh Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	Perusahaan melaksanakan *Stress Test* terkait risiko dalam memenuhi persyaratan solvabilitas, termasuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan, seperti Perubahan kondisi ekonomi, yang dapat berdampak pada keadaan keuangan Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.	Perusahaan mengembangkan *Contingency Plans* khususnya untuk menanggulangi risiko-risiko yang diyakini bisa terjadi, seperti bencana alam, serangan teroris, kegagalan sistem teknologi informasi, kekosongan Direksi atau posisi manajemen kunci. Penyusunan *Contingency Plans* dilakukan melalui pendekatan yang berkesinambungan dan dikomunikasikan kepada karyawan melalui training	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

F. Audit Internal

Perusahaan memiliki satuan kerja yang melaksanakan fungsi auditor internal. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, auditor internal harus :

1.	Menyusun dan melaksanakan rencana audit dalam rangka menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari sistem yang dimiliki Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.	Mengaudit semua area kegiatan yang mengandung risiko cukup material diaudit dalam jangka waktu yang memadai	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Menerbitkan laporan temuan dan rekomendasi berdasar hasil audit kepada Manajemen	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	Melaporkan hasil audit dan temuan yang signifikan ke Direksi dan Dewan Komisaris	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.	Melaporkan kecukupan fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan fungsi pengendalian lainnya kepada manajemen.	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.	Rencana audit dibahas dengan komite audit dan disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

G. Auditor Eksternal

1.	Auditor Eksternal (kantor akuntan publik) melakukan pemeriksaaan secara independen terhadap kebenaran laporan yang disajikan oleh Direksi	**Tidak**	**Ya**
2.	Kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	**Tidak**	**Ya**
3.	Penunjukan KAP diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS	**Tidak**	**Ya**
4.	Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Komisaris	**Tidak**	**Ya**
5.	Auditor Eksternal bebas dari pengaruh Direksi	**Tidak**	**Ya**
6.	Auditor Eksternal bebas dari pengaruh pihak yang berkepentingan lainnya di Perusahaan	**Tidak**	**Ya**
7.	Auditor Eksternal memiliki akses atas semua catatan akuntansi	**Tidak**	**Ya**
8.	Auditor Eksternal memiliki akses atas semua data penunjang yang diperlukan	**Tidak**	**Ya**
9.	Auditor Eksternal tidak memberikan jasa lain selain jasa audit	**Tidak**	**Ya**
10.	Penunjukan KAP diusulkan oleh komite audit kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dimintakan persetujuan RUPS	**Tidak**	**Ya**

H. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

1.	Perusahaan mempunyai mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran yang mencatat setiap pelanggaran yang membahayakan kepentingan perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
2.	Penanggung jawab sistem pelaporan pelanggaran menyampaikan laporan pelanggaran kepada Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
3.	Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat melindungi Pelapor	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
4.	Penanggung jawab Sistem Pelaporan Pelanggaran segera menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh Pelapor	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

I. Aktuaris Perusahaan

1.	Perusahaan memiliki aktuaris Perusahaan yang bertindak independen	**Tidak langsung ke VI**	**Ya**
2	Aktuaris wajib memberikan saran secara profesional kepada Direksi terkait:		
2.1.	Pendapat tentang ketetapan teknis yang terkait kerangka evaluasi yang disiapkan perusahaan	**A** **B** **C** **D** **E**	
2.2.	Identifikasi dan estimasi risiko utama dan manajemen risiko yang tepat	**A** **B** **C** **D** **E**	
2.3.	Menilai manajemen risiko	**A** **B** **C** **D** **E**	
2.4.	Testing kondisi keuangan	**A** **B** **C** **D** **E**	
2.5.	Strategi investasi dan manajemen kekayaan-kewajiban	**A** **B** **C** **D** **E**	
2.6.	Menilai kecukupan modal dari segi peraturan dan ekonomis	**A** **B** **C** **D** **E**	
2.7.	Kecukupan premi dan nilai tunai	**A** **B** **C** **D** **E**	
2.8.	*Management participating fund*, termasuk analisa pengaruh utama sebagai akibat strategi dan kebijakan	**A** **B** **C** **D** **E**	
2.9.	Desain produk, mengurangi risiko dan kewajiban manajemen risiko lainnya	**A** **B** **C** **D** **E**	
3.	Aktuaris mempunyai akses ke Direksi dan Rapat Direksi yang relevan maupun unit operasional	**A** **B** **C** **D** **E**	

4.	Aktuaris diberikan wewenang untuk berkomunikasi dengan staf di divisi yang hasil pekerjaannya berkaitan dengan fungsi aktuaris yang ditunjuk	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
5.	Aktuaris memberikan rekomendasi tentang tarif premi dengan jaminan bahwa penetapan tarif premi tersebut telah sesuai dengan struktur internal	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.	Aktuaris memberikan rekomendasi jumlah dividen bagi pemegang polis untuk dibagikan kepada *participating policyholders*, dengan memperhatikan faktor kewajaran dan keadilan diantara berbagai kelompok pemegang polis	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
7.	Aktuaris dapat memberikan pendapat mengenai cara investasi yang harus dilakukan Perusahaan	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
8.	Perusahaan tidak memberikan tugas lain kepada aktuaris yang dapat menimbulkan benturan kepentingan	**Tidak**		**Ya**		

PERNYATAAN PENERAPAN PEDOMAN GCG

1.	Pernyataan tentang Penerapan GCG dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perusahaan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	**Tidak Ada**	**Ya**
2.	Laporan tahunan tersebut harus memuat informasi tentang struktur dan mekanisme kerja organ Perusahaan meliputi:		
2.1.	Nama anggota Dewan Komisaris	**Tidak**	**Ya**
2.2.	Jumlah Rapat yang dilakukan Dewan Komisaris dan daftar hadir	**Tidak**	**Ya**
2.3.	Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self assessment*) tentang kinerja masing-masing Komisaris	**Tidak**	**Ya**
2.4.	Penjelasan mengenai komite penunjang Dewan Komisaris		
2.4.1.	Nama	**Tidak**	**Ya**
2.4.2.	Uraian Fungsi	**Tidak**	**Ya**
2.4.3.	Mekanisme Kerja	**Tidak**	**Ya**
2.4.4.	Jumlah Rapat	**Tidak**	**Ya**
2.4.5.	Daftar hadir	**Tidak**	**Ya**
2.4.6.	Mekanisme dan kriteria Penilaian Kinerja Komite	**Tidak**	**Ya**
2.5.	Nama Anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing	**Tidak**	**Ya**
2.6.	Penjelasan singkat mengenai mekanisme kerja Direksi	**Tidak**	**Ya**
2.7.	Jumlah rapat yang dilakukan Direksi dan Daftar hadir	**Tidak**	**Ya**
2.8.	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal, termasuk sistem pengendalian risiko dan sistem pengawasan dan audit internal.	**Tidak**	**Ya**
2.9.	Informasi lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG, meliputi:		
2.9.1.	Visi, Misi dan Nilai Perusahaan	**Tidak**	**Ya**
2.9.2.	Pemegang Saham pengendali	**Tidak**	**Ya**
2.9.3.	Kebijakan dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	**Tidak**	**Ya**
2.9.4.	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan	**Tidak**	**Ya**

2.9.5.	Hasil penilaian penerapan GCG yang dilaporkan dalam RUPS Tahunan	**Tidak**	**Ya**
2.9.6.	Kejadian luar biasa yang dialami Perusahaan dan berpengaruh pada kinerja Perusahaan	**Tidak**	**Ya**

3. Rencana Tindak (*Action Plan*)

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.	**-**	**-**	**-**	**-**
2.	**-**	**-**	**-**	**-**
dst.				